

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(STUDI KASUS DESA BANDAR ALAI KARI)**

SKRIPSI

“disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat mencapai
Gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Administrasi Negara”



**OLEH:
MAY SHINDY FEBIOLA
220411041**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 18
Bulan : Juni
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA


SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SEKRETARIS


EMILIA EMHARIS S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

- | | | |
|---------------------------------|----------------------|---|
| 1. RIKA RAMADHANTI, S.Ip., M.Si | (Pembimbing I) | () |
| 2. EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si | (Pembimbing II) | () |
| 3. DESRIADI, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji I) | () |
| 4. SAHRI MUHARAM, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji II) | () |



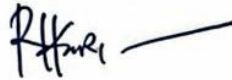
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

SARJAN M. S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI
KASUS DESA BANDAR ALAI KARI)
NAMA : MAY SHINDY FEBIOLA
NPM : 220411041
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PEMBIMBING II



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : MAY SHINDY FEBIOLA
NPM : 220411041

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 8 Juni 2026



MAY SHINDY FEBIOLA
NPM. 220411041

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.
(QS. Ar-Ra’d: 11)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.
(QS. Al-Insyirah:6)

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”.
(QS. Ar-Ruum: 60)

“You think it’s over but it’s just begun”.
(A Little Piece Of Heaven – Avenged Sevenfold)

PERSEMBAHAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengembal amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW, yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah*. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang tidak pernah berhenti memberikan cinta, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya. Terima kasih atas segala usaha yang telah diberikan demi pendidikan saya, atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah saya, serta atas kesabaran dalam membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

Kepada adik tersayang, terima kasih atas semangat, keceriaan, serta dukungan yang selalu diberikan kepada saya. Kehadiranmu menjadi salah satu alasan saya untuk terus berjuang dan menjadi contoh yang lebih baik untukmu nantinya.

Kepada sahabat-sahabat terbaik saya Silvia Ramadhani dan Tiara Dia Pransiska, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan saling menyemangati selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang harus dilalui. Semoga ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik di masa depan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menjadi langkah awal untuk meraih cita-cita, serta membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

Billahi fi Sabili al-haq, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



MAY SHINDY FEBIOLA
NPM. 220411041

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebuah ucapan rasa syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan kepada Allah SWT yang memberikan segala bentuk nikmat dan karunia-Nya kepada hambanya untuk melihat dan menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. terutama untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan petunjuk dan keredhoan-Nya yang pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan. Untukmu sang pengemban amanat yang tak pernah berbuat khianat dan pembawa risalah yang takut akan berbuat salah yaitu Rasulullah SAW yang akan tetap selalu penulis persembahkan sebuah doa keselamatan untuknya dan keluarga serta para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sebagai *rijal ad-da'wah* yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kehancuran menuju kehidupan yang berperadapan (*yukhrijuhum min azh-zhulumat ila an-nur*) mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang terpilih dan layak untuk mendapatkan syafa'at dari-Nya Amin.

Sebuah penelitian dengan judul : **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DESA BANDAR ALAI KARI)”**, yang penulis angkat merupakan kajian dan telaah mencoba menemukan sebuah urgensi implemntasi dari suatu agenda kebijakan, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi telah dilaksanakan di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Manfaat penelitian ini hendaknya dapat memberikan kontribusi kepada objek yang diteliti, sehingga memberikan rekomendasi sebagai acuan memperbaiki penanggulangan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari.

Proses perancangan, penyusunan, pembuatan, serta penyelesaian penelitian ini penulis tidak menafikan bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pembuatannya. Baik itu sifatnya dukungan materil, moril maupun dukungan spirituul berupa data, fasilitas, semangat dan motivasi, masukan, kritikan dan saran serta doa yang begitu besar terhadap penulis. Sehingga penulis mampu melewati

berbagai halangan dan rintangan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah membantu terbentuknya skripsi ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pdi., M.Pdi. Selaku rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Sarjan M., S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
4. Ibu Rika Ramadhanti, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan dan penelitian ini;
5. Emilia Emharis, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan selama perkuliahan dan penelitian ini;
6. Ibu Melliofatria, S.Pd, M. Pd selaku Penasehat Akademik (PA) yang banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan serta motivasi penulis dalam kesuksesan penulisan penelitian ini.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Dosen/Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik, memberikan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu penulis sehingga lancarnya proses administrasi dalam menyelesaikan pendidikan akademik penulis.
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan banggakan, terimakasih untuk segala yang sudah di berikan sampai pada titik ini.

10. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu Dinas Sosial, Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Bandar Alai Kari, Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dihaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan, serta data yang telah bapak-bapak dan ibu-ibu berikan kepada penulis.

11. Serta teman-teman seperjuangan saya yaitu Silvia Ramadhani, Tiara Dia Pransiska, yang sudah memberikan suport yang tak terhingga kepada saya. Dan teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara Kelas B angkatan 2022, sukses untuk kita semua.

Meskipun penulis telah berusaha keras dalam penulisan penelitian ini, namun penulis masih merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari semua pihak guna untuk perbaikan menuju kearah kesempurnaan menuju penelitian selanjutnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga atas segala apa yang telah diberikan oleh semua pihak dapat menjadi sebuah amal kebajikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Teluk Kuantan,



MAY SHINDY FEBIOLA
NPM. 220411041

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Akademis :	9
1.4.2 Manfaat Praktis :	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Administrasi Negara	11
2.1.2 Teori Kebijakan Publik.....	13

	Halaman
2.1.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat.....	16
2.1.4 Teori Penanggulangan Kemiskinan	19
2.1.5 Teori Kemiskinan	22
2.2 Kerangka Pemikiran	24
2.3 Hipotesis	25
2.4 Definisi Operasional	26
2.5 Operasional Variabel	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Informan Penelitian	28
3.3 Sumber Data	29
3.4 Lokasi Penelitian	30
3.5 Waktu Penelitian	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	30
3.7 Teknik Analisis Data	31
3.8 Jadwal Penelitian	33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	76
4.1 GAMBARAN UMUM DESA BANDAR ALAI KARI	76
4.1.1 Sejarah Desa Bandar Alai Kari.....	76
4.1.2 Demografi Desa Bandar Alai Kari.....	79
4.1.3 Keadaan Ekonomi.....	81
4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa.....	82
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

5.1 Identitas Responden.....	Error! Bookmark not defined.
	Halaman
5.1.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..	Error! Bookmark not defined.
5.1.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Pembahasan dan Hasil Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Indikator Peningkatan Pendapatan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2.2 Indikator Akses Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
5.2.3 Indikator Akses Kesehatan	Error! Bookmark not defined.
5.2.4 Indikator Kesempatan Kerja	Error! Bookmark not defined.
BAB VI PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
6.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
6.2 Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. 1	: Data Penduduk Miskin Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	2
1. 2	: Daftar APBD 2024 Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	4
2. 1	: : Operasional Variabel Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)	27
3. 1	: Informan Penelitian Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)	29
3. 3	: Jadwal Penelitian Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)	32
4. 1	: Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	36
4. 2	: Letak Geografis Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	37
4. 3	: Kondisi Demografis Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
4. 4	: Orbitasi Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	38
4. 5	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
4. 6	: Keadaan Sosial Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	39
4. 7	: Lembaga Pemerintahan Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	40
4. 8	: Lembaga Kemasyarakatan Desa Bandar Alai Kari	

Tabel		Halaman
	Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
5. 1	: Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.....	42
5. 2	: Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).....	25
4. 1 : Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
I	: Daftar Wawancara Penelitian tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).....
II	: Dokumentasi Penelitian Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)
III	: Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 049/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara
IV	: Surat Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 140/FIS/UNIKS/XII/2025 Tentang Permohonan Riset
V	: Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 13/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2026 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi
VI	: Surat Balasan Riset Dari Dinas Sosial Tentang Penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)
VII	: Surat Balasan Riset Dari Kantor Desa Bandar Alai Kari Tentang Penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)
VIII	: Catatan Bimbingan Proposal dan Skripsi Penelitian tentang Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)

IX	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian tentang Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).....
X	: Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian tentang Penelitian Tentang Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).....
XI	: Daftar Riwayat Hidup Penulis

ABSTRAK

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DESA BANDAR ALAI KARI)

mayshindyfebiola210@gmail.com

OLEH :

MAY SHINDY FEBIOLA

NPM. 220411042

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari, dengan fokus pada pelaksanaan, efektivitas, serta kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat desa, pihak pemerintah daerah, serta masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui PPMD di Desa Bandar Alai Kari telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program. Selain itu, pengawasan dan evaluasi program juga belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan desa, penguatan koordinasi antar pihak terkait, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Penanggulangan Kemiskinan, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD)

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE POLICIES OF THE KUANTAN SINGINGI REGENCY LOCAL GOVERNMENT IN POVERTY REDUCTION (CASE STUDY OF BANDAR ALAI KARI VILLAGE)

mayshindyfebiola210@gmail.com

BY :
MAY SHINDY FEBIOLA
NPM. 220411042

Poverty is a complex social issue and remains a major challenge for local governments in achieving community welfare. This study aims to analyze the policies of the Kuantan Singingi Regency Government in poverty alleviation in Bandar Alai Kari Village, focusing on the implementation, effectiveness, and challenges faced in the implementation of the Village Community Empowerment Program (PPMD). This study employs a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The informants in this study consisted of village officials, local government representatives, and community members who are beneficiaries of the program. The results show that the implementation of poverty alleviation policies through the PPMD in Bandar Alai Kari Village has been carried out, but has not yet been optimal. This is due to several constraints, including limited budget, lack of human resource capacity, weak coordination among institutions, and low community participation in the program. In addition, monitoring and evaluation of the program have not been conducted optimally. Therefore, efforts are needed to improve village institutional capacity, strengthen coordination among stakeholders, increase community participation, and enhance monitoring and evaluation to ensure that poverty alleviation programs are more effective and sustainable.

Keywords: Government Policy, Poverty Alleviation, Village Community Empowerment Program (PPMD)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, masalah kemiskinan masih menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Data kemiskinan dari tahun 2019-2024 di Kabupaten Kuantan Singingi cenderung mengalami penurunan (Statistik 2025)

Salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan adalah Desa Bandar Alai Kari, sebuah wilayah dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang memerlukan perhatian khusus. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2025, jumlah penduduk Desa Bandar Alai Kari mencapai 1.300 jiwa, terdiri atas 613 laki-laki dan 687 perempuan. Desa ini memiliki 243 kepala keluarga (KK), dengan 43 KK tergolong sebagai keluarga miskin berdasarkan data desa tahun 2025. Angka ini menunjukkan bahwa 17.84% penduduk desa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak.

Data kemiskinan yang terdapat di Desa Bandar Alai Kari dari tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Penduduk Miskin

Jumlah Masyarakat Miskin Desa Pintu Gobang Kari	Tahun			
	2022	2023	2024	2025
	59 KK	52 KK	41 KK	43 KK

Sumber: data Desa Bandar Alai Kari

Berdasarkan data kemiskinan Desa Bandar Alai Kari, jumlah keluarga miskin mengalami penurunan dari 59 KK pada tahun 2022 menjadi 41 KK pada tahun 2024. Akan tetapi pada tahun 2025 jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 43 KK. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan belum berlangsung secara konsisten sehingga masih terdapat kerentanan ekonomi pada sebagian masyarakat. Peningkatan kembali jumlah keluarga miskin mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki kemampuan ekonomi yang stabil dan masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Bantuan sosial memang mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, program pemberdayaan ekonomi seperti PPMD masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pendampingan usaha.

Selain aspek ekonomi, kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian tradisional dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah serta pendapatan yang tidak menentu. Kondisi tersebut

diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitas kesehatan, serta kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Akibatnya, kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri masih relatif terbatas.

Apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah daerah, maka keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga pada kualitas implementasi kebijakan. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi antarorganisasi, ketepatan sasaran penerima manfaat, pengawasan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program. Tanpa adanya faktor-faktor tersebut, berbagai program yang telah dirancang berpotensi belum mampu menghasilkan dampak yang optimal terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Masyarakat Desa Bandar Alai Kari sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tidak menentu. Faktor geografis, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya infrastruktur menjadi penyebab utama mengapa kemiskinan di daerah ini sulit diatasi.

Dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program di Desa Bandar Alai Kari. Beberapa program yang menjadi fokus utama adalah:

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Program pemerintah ini memberikan bantuan dalam bentuk keuangan langsung kepada keluarga miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, sering kali bersifat sementara.

2. Program Keluarga Harapan (PKH): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMd): Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, pelatihan keterampilan, penguatan kelembagaan desa, serta dukungan terhadap usaha mikro dan kegiatan produktif masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disalurkan ke desa, termasuk untuk pembiayaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD). Namun, besarnya alokasi anggaran tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan capaian penurunan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas pemanfaatan anggaran dan implementasi kebijakan di tingkat desa.

Tabel 1.2 Daftar APBD Bandar Alai Kari 2024

PENDAPATAN			
PENDAPATAN DESA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Pendapatan Asli Desa	Rp. 00.000	Rp. 0	Rp. 2.800.000
Pendapatan Transfer	Rp. 1.648.353.000	Rp. 1.530.292.872	Rp. 118.060.128
Dana Desa	Rp. 981.853.000	Rp. 981.853.000	Rp. 0
ALOKASI DANA DESA UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN			
BLT	Rp.108.000.000	Rp.108.000.000	Rp.0
PKH	Rp.63.000.000	Rp.63.000.000	Rp.0
PPMD	Rp.45.000.000	Rp.45.000.000	Rp.0
TOTAL Rp.216.000.000			
Bagi Hasil Pajak dan	Rp. 43.355.000	Rp. 28.904.000	Rp.

PENDAPATAN			
PENDAPATAN DESA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Retribusi			14.451.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 393.526.000	Rp. 296.516.872	Rp. 97.009.128
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 209.819.000	Rp. 209.819.000	Rp. 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	Rp. 19.800.000	Rp. 13.200.000	Rp. 6.600.000
Pendapatan Lain-lain	Rp. 54.266.761	Rp. 51.127.018	Rp. 3.139.743
BELANJA			
BIDANG	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
Belanja Pegawai	Rp. 348.612.000	Rp. 261.027.000	Rp. 87.585.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp. 783.542.103	Rp. 741.613.832	Rp. 41.928.271
Belanja Modal	Rp. 640.982.625	Rp. 450.733.000	Rp. 190.159.625
Belanja Tidak Terduga	Rp. 155.200.000	Rp. 155.200.000	Rp. 0,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.928.246.728	Rp. 1.608.573.832	Rp. 319.672.896
Surplus/Defisit	Rp. 225.626.967	Rp. 27.153.942	Rp. 198.473.025
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	Rp. 235.982.783	Rp. 235.982.783	Rp. 0,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.355.816	Rp. 10.350.000	Rp. 5.816
Pembiayaan Netto	Rp. 225.626.967	Rp. 225.632.783	Rp. 5.816
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	Rp. 0	Rp. 198.748.841	Rp. 198.478.841

Meskipun alokasi APBD menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, realisasi di lapangan belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) di Desa Bandar Alai Kari belum menunjukkan hasil yang sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala dalam pelaksanaan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya koordinasi

antar perangkat desa, serta keterbatasan dana dan sumber daya manusia dalam menjalankan program tersebut. Akibatnya, sebagian masyarakat belum merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemberdayaan yang telah diterapkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah, khususnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari.

Berdasarkan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 Rp216.000.000 atau 22% dari total Dana Desa sebesar Rp981.853.000 diarahkan untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan. Alokasi terbesar diprioritaskan pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bentuk perlindungan sosial bagi keluarga miskin, sedangkan sisanya dialokasikan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan.

Komposisi alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Namun demikian, berdasarkan perkembangan jumlah keluarga miskin yang masih mengalami fluktuasi, efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan pemerintah daerah, khususnya pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Bandar Alai Kari.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan: Peningkatan pendapatan masyarakat dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Akses Pendidikan: Akses pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan.

3. Akses Kesehatan: Akses kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi biaya kesehatan yang tinggi.

4. Kesempatan Kerja: Kesempatan kerja yang lebih baik dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam konteks pengukuran kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan bahwa masyarakat miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tersebut mencakup dua komponen utama, yaitu garis kemiskinan makanan yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan minimum energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta garis kemiskinan non-makanan yang meliputi kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, sandang, dan transportasi.

Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga sebagai ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi standar hidup minimum secara layak.

Selain pendekatan pengeluaran, kemiskinan juga dapat diidentifikasi melalui karakteristik sosial ekonomi rumah tangga. Kriteria masyarakat miskin antara lain ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan dan aset produktif, kondisi rumah tidak layak huni, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, ketergantungan pada pekerjaan sektor informal dengan pendapatan tidak menentu, serta rendahnya kemampuan dalam menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Rumah tangga miskin umumnya juga memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan kriteria tersebut, masyarakat miskin di Desa Bandar Alai Kari tidak hanya menghadapi persoalan pendapatan yang rendah, tetapi juga mengalami keterbatasan struktural yang bersifat multidimensional. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kebijakan pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan, khususnya melalui program yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia masyarakat desa.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari dengan fokus pada efektivitas, implementasi, dan dampak Program Pemberdayaan

Masyarakat Desa (PPMD) terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi strategis yang berguna bagi perbaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Desa Bandar Alai Kari.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Bandar Alai Kari?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Bandar Alai Kari, termasuk pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah diterapkan di daerah tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan publik dan ekonomi pembangunan, khususnya dalam konteks penanggulangan kemiskinan di daerah pedesaan.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

1.4.2 Manfaat Praktis :

- a. Menyediakan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah Pitu Gobang Kari dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan

penanggulangan kemiskinan yang sudah ada, agar lebih efektif dan tepat sasaran.

- b. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah terkait strategi dan kebijakan yang perlu diperkuat atau diperbaiki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di daerah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Menurut Sondang P. Siagian dalam (Ridwan 2021) mengartikan Administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.

Menurut Sondang P . Siagian dalam (Yunita 2021) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan prose kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atau rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Soerjano Soekanto dalam (Syafii 2020) secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah (knowledge) yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat dikontrol secara kritis oleh orang lain atau umum

Menurut Sondang P . Siagian (dalam (Syafii 2020) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dari pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Jhon M. Pffifner (Hildawati et al. 2024) administrasi Negara adalah dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat ketatanegaraan. Dari pendapat Jhon M. Pffifner administrasi

negara merupakan alat dan proses untuk mencapai tujuan negara. Tujuan-tujuan negara akan terlaksana jika negara memiliki administrasi ketatanegaraan yang baik.

Menurut (Arifin 2021) Administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Dari Pendapat yang dikemukakan oleh, administrasi negara merupakan suatu bentuk pelaksanaan politik pemerintah, terlaksananya administrasi negara dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yaitu melalui proses politik.

Menurut E. Dimock (Zein and Septiani 2023) administrasi Negara adalah kegiatan pemerintah di dalam melaksanakan kegiatan politiknya.

Menurut Dwight Waldo (Luaylik 2020) Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Pendapat dari Dwight Waldo tentang administrasi negara merupakan manajemen dimana pemerintah harus menerapkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengevaluasi dan pengarahan dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah.

Dengan demikian, negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organisasi, kewilayahan/kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa, baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam an luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram, bangsa yang

teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Pengertian administrasi ada dua macam yaitu : administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas, Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali dan serta keseluruhan dan dalam suatu hubungan satu sama lain.

Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luass adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarka pembagin kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secra efektif dan efesien. Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang,, kerjasama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang turut dalam proses, tujuan yang akan tercapai dan pemanfaatan sebagai sumber (Syafari 2021).

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik lainnya untuk mengatasi masalaah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik dapat berupa undang-undang peraturan, program, atau proyek yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, meningkatkan kesejahteraan, atau memecahkan masalah sosial.

Menurut James Anderson: Kebijakan Publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Suaib 2022

Menurut Harold Lasswell(Winarno 2016) Kebijakan Publik merupakan proses pembuatan keputusan yang melibatkan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk mengatasi masalah atau pencapaian tertentu.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, dalam (Fitriani 2022) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam (Shakroni 2023) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam (Muslimah 2021) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai ‘whatever government choose to do or not to do’. Artinya, kebijakan public adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’.

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 (Sahlania and Mana 2023) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah

yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Kebijakan publik melakukan pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor serta kepentingan yang berbeda. Kebijakan publik juga serangkaian tindakan yang terkoordinasi dan terarah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Definisi ini menekankan pada tindakan yang terkoordinasi dan terarah dari pemerintah dalam merespons masalah publik.

Kebijakan publik ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat. Dan kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah atau isu yang dianggap sebagai masalah publik. Secara umum, kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia berfokus pada dua pendekatan utama:

1. Pendekatan Jangka Pendek (Social Protection): Program ini bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan menyediakan bantuan langsung berupa uang, sembako, atau bantuan non-pangan lainnya. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan contoh dari pendekatan ini.

2. Pendekatan Jangka Panjang (Pemberdayaan Ekonomi): Fokus dari pendekatan ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin untuk mengakses peluang ekonomi yang lebih baik, seperti melalui pemberdayaan desa, kredit mikro, dan pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat.

2.1.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mas'ood (2020), pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Selain itu, Somoediningrat keberdayaan masyarakat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. (Sukmana 2022)

Menurut widjaja dalam (Thamrin and Wahyudi 2021) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawatan bawah yang intinya pemberdayaan upaya membnagkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurt soeharto dalam (Annisa 2023) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdyaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayaakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdyakan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya

Menurut Eko dalam (Dewi, Susanty, and Martayadi 2024) Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Menurut (Indonesia 2014) Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. (Anon 2005) Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat berkemampuan dan berkekuatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah

harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk meenggerakan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemnberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga mampu menciptakan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

1. Akses terhadap sumber daya
2. Akses terhadap teknologi
3. Akses terhadap pasar
4. Akses terhadap sumber pembiayaan

Keempat akses ini, disamping menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.

Keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi kebijakan itu sendiri maupun dari sisi implementasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah: Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana berbagai instansi pemerintah dapat bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program kemiskinan.

2. Ketersediaan dan Alokasi Sumber Daya: Efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang ada di daerah.

3. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat yang terlibat aktif dalam program-program penanggulangan kemiskinan akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang manfaat program dan akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi.

2.1.4 Teori Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Todaro dalam (Andina and Wahyudi 2024) penanggulangan kemiskinan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang produktif. Artinya, kemiskinan tidak hanya masalah pendapatan rendah, tetapi juga keterbatasan akses terhadap sumber daya pembangunan.

Saharia dalam (Mustakim 2022) Mengusulkan lima cara pengembangan SDM: memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan, latihan jabatan, pendidikan (dasar, menengah, tinggi), pelatihan bagi orang dewasa, dan rotasi jabatan kepemimpinan.

Kuznets dalam (Amdan and Sanjani 2023) Mengartikan pendidikan sebagai investasi SDM untuk meningkatkan taraf hidup, yang akan membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan keluar dari kemiskinan.

Secara umum, teori penanggulangan kemiskinan adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan cara, strategi, dan pendekatan untuk mengurangi serta menghapus kemiskinan melalui berbagai aspek ekonomi, sosial, dan pembangunan manusia.

Teori ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, tetapi juga mencakup pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumber daya, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan, serta partisipasi dalam pembangunan

Menurut Amartya Sen dalam (Iswahyudi and Asnawi 2024) penanggulangan kemiskinan harus berfokus pada perluasan kemampuan dasar manusia, seperti pendidikan, kesehatan, akses informasi, serta kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif adalah yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar bantuan finansial.

Inti teori: Fokus pada peningkatan kemampuan agar individu dapat hidup produktif dan mandiri.

Implementasi kebijakan: Program pendidikan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Menurut Paul Streeten dalam (Pinontoan 2020) kemiskinan muncul karena ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar tersebut agar masyarakat dapat mencapai taraf hidup minimum yang layak.

Inti teori: Fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan kesejahteraan.

Implementasi kebijakan: Program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan penyediaan sarana pendidikan serta infrastruktur dasar.

Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan. Beberapa program utama yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Program Keluarga Harapan (PKH): Program yang memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin yang memenuhi syarat tertentu. PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memberikan bantuan untuk akses pendidikan dan kesehatan.

2. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Bantuan uang tunai langsung yang diberikan kepada keluarga miskin untuk meringankan beban ekonomi, terutama di daerah-daerah yang terkena dampak bencana atau krisis ekonomi.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD): Program yang mengarahkan bantuan kepada desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, penyuluhan, dan pengembangan ekonomi lokal.

Kebijakan-kebijakan ini tentu saja perlu diimplementasikan dengan baik untuk dapat memberikan dampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, analisis mengenai efektivitas implementasi kebijakan tersebut di Bandar Alai Kari menjadi penting.

2.1.5 Teori Kemiskinan

Menurut Mudrajat Kuncoro dalam (Indrawati, Ermawati, and Istiqamah 2019) kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada tingkat konsumsi. Garis kemiskinan menurutnya terdiri dari dua unsur penting, yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, serta (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Chambers dalam (Abdussamad and Rapanna 2023) Menjelaskan kemiskinan sebagai fenomena multidimensional yang tidak hanya menyangkut finansial, tetapi juga kelemahan fisik, kerentanan, ketidakberdayaan, dan keterasingan.

Nugroho dan Dahuri dalam (Sianipar, Masinambow, and Lapian 2022) Mengartikan kemiskinan sebagai kondisi absolut atau relatif di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar sesuai norma dan nilai yang berlaku.

Yacoub juga Melihat kemiskinan sebagai masalah global yang bersumber dari ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dari pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.

Selanjutnya, Todaro dan Smith dalam (Kurniawati 2022) menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kemampuan seseorang dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak. Mereka memperkenalkan konsep

multidimensional poverty atau kemiskinan multidimensi yang menekankan bahwa seseorang bisa dikatakan miskin bukan hanya karena pendapatannya rendah, tetapi juga karena tidak memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan standar sosial yang berlaku di masyarakat.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, yang tidak hanya mencerminkan kekurangan pendapatan atau konsumsi, tetapi juga berhubungan erat dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekuasaan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga dimensi sosial dan kultural yang lebih luas. Suharto dalam Zuliansyah 2024 menjelaskan bahwa kemiskinan dapat dipahami melalui dua paradigma besar, yaitu paradigma neo-liberal dan paradigma sosial demokrasi. Paradigma neo-liberal memandang kemiskinan sebagai akibat dari kelemahan individu, seperti kurangnya etos kerja, keterampilan, dan motivasi. Dengan kata lain, penyebab kemiskinan bersifat personal dan dapat diatasi melalui peningkatan kemampuan individu. Sementara itu, paradigma sosial demokrasi menekankan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari struktur sosial dan kebijakan ekonomi yang tidak adil. Dalam pandangan ini, kemiskinan terjadi karena distribusi sumber daya dan kesempatan yang timpang, sehingga intervensi negara dianggap perlu untuk memperbaiki ketimpangan tersebut melalui kebijakan sosial dan ekonomi yang berpihak kepada kelompok miskin.

Dari perspektif pembangunan, Amartya Sen dalam susanto 2025 melalui pendekatan capability mengemukakan bahwa kemiskinan terjadi ketika seseorang

tidak memiliki kebebasan atau kemampuan untuk menjalankan fungsi dasar kehidupannya. Menurut Sen, ukuran kesejahteraan tidak hanya dilihat dari pendapatan, melainkan dari sejauh mana individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kemiskinan harus berorientasi pada peningkatan kemampuan dasar manusia (*human capability*), seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, struktural, dan budaya. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui kebijakan yang komprehensif, meliputi peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, pemberdayaan masyarakat, serta reformasi kebijakan ekonomi daerah. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap teori kemiskinan menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggambarkan hubungan logis antara kebijakan pemerintah daerah dengan indikator keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui berbagai program dan strategi pembangunan yang terarah.

Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan pemerintah diukur melalui beberapa indikator, yaitu peningkatan pendapatan, akses pendidikan, akses kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian, hubungan logis dalam kerangka pemikiran penelitian ini menunjukkan bahwa semakin efektif kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta membuka kesempatan kerja, maka semakin besar pula dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah penelitian, khususnya di Desa Bandar Alai Kari.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Teori Evaluasi William N. Dunn (2019)

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu kaidah pernyataan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menyatakan hubungan antar dua variabel atau lebih Noor 2016 Hipotesis pada penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pemerintah

daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari diduga belum berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya, koordinasi, dan keterlibatan masyarakat.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur dengan melihat indikator dan membuat instrumen penelitian dari suatu konsep variabel (Noor 2016) Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pendapatan

Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil menengah (UKM), pertanian, maupun lapangan kerja produktif. Peningkatan pendapatan menjadi indikator langsung dari keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

2. Akses Pendidikan

Pendidikan berperan sebagai sarana penting dalam mengurangi kemiskinan jangka panjang. Kebijakan yang memberikan akses pendidikan yang merata dan terjangkau akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya memperbesar peluang ekonomi masyarakat.

3. Akses Kesehatan

Kesehatan masyarakat berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja. Pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, karena kesehatan merupakan salah

satu komponen dasar dalam peningkatan kesejahteraan.

4. Kesempatan Kerja

Salah satu faktor penyebab utama kemiskinan adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja menjadi kunci dalam menurunkan angka kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat, serta pelatihan keterampilan menjadi bagian penting dalam indikator ini.

Dari keempat indikator tersebut, diharapkan tercapai tujuan akhir, yaitu terciptanya kebijakan pemerintah yang baik (good governance) dalam penanggulangan kemiskinan.

2.5 Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono 2021) definisi operasional variabel penelitian adalah elemen atau nilai yang berasal dari objek atau kegiatan yang memiliki ragam variasi tertentu yang kemudian akan ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan objek penelitian dan metode penelitian yang digunakan, maka dibawah ini diungkapkan operasional variabel penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Operasional Variabel

No	Judul	Indikator	Sub Indikator
1.	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan	1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat 2. Akses Terhadap Pendidikan 3. Akses Terhadap Kesehatan 4. Kesempatan Kerja	Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Arsip Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), serta wawancara dengan masyarakat miskin dan perangkat desa

No	Judul	Indikator	Sub Indikator
	Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)	atau Kesiediaan Lapangan Kerja	

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.(Sugiyono 2019)

Karakter khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari secara komprehensif dan rinci.

Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu *setting* tertentu pula.

3.2 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. Yaitu teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud atau tujuan tertentu. Yang mana menggap informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dilakukan.

Tabel 3.1 : Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah	Persentasi
1.	Kepala Desa	1	12,5%
2.	Kepala Dusun	1	12,5%
3.	Sekretaris Desa	1	12,5%
4.	Kasi Kesejahteraan	1	12,5%
5.	Masyarakat Miskin	3	37,5%
6.	Kepala Bidang Kemiskinan Dinas Sosial	1	12,5%
	Jumlah	8	100%

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui kegiatan penelitian lapangan (field research). Data ini dikumpulkan untuk mendapatkan informasi aktual mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Desa Bandar Alai Kari. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan perangkat desa dan masyarakat miskin, serta observasi terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah di tingkat desa.

3.3.2 Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti laporan Badan Pusat Statistik (BPS), literatur

ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari data primer sehingga hasil analisis menjadi lebih komprehensif dan valid.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bandar Alai Kari, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kuantan Singingi, karena penulis meneliti terhadap Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).

3.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan oktober hingga November 2025. Waktu penelitian ini dipilih untuk memperoleh data yang relevan dengan kebijakan yang sedang berlaku.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara : Wawancara akan dilakukan dengan masyarakat Bandar Alai Kari yang terlibat langsung dalam program penanggulangan kemiskinan, serta perangkat desa yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi subjek penelitian terkait kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Wawancara dilakukan secara terbuka, di mana peneliti memiliki panduan pertanyaan, namun tetap memberikan ruang bagi subjek untuk mengungkapkan

pendapat secara bebas.

2. Observasi : Peneliti akan melakukan observasi langsung di Bandar Alai Kari untuk melihat secara langsung implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

3. Dokumentasi : Dokumentasi berupa data dan laporan terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut akan dikumpulkan. Ini meliputi dokumen kebijakan, laporan tahunan, dan data statistik yang terkait dengan kondisi kemiskinan di Bandar Alai Kari. Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kebijakan yang diterapkan.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Transkripsi Data: Semua hasil wawancara dan catatan observasi akan ditranskripsikan untuk memudahkan analisis. Proses transkripsi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh dapat dianalisis secara menyeluruh.

2. Kategorisasi dan Kodefikasi: Data yang terkumpul akan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan tema yang muncul dari wawancara dan observasi. Setiap tema akan diberi kode untuk memudahkan identifikasi dan analisis.

3. Penyusunan Tema: Setelah data dikategorikan, peneliti akan menyusun tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti implementasi kebijakan,

efektivitas program, kendala yang dihadapi, dan dampak terhadap masyarakat.

4. Analisis Tematik: Peneliti akan menganalisis data berdasarkan tema-tema yang muncul, kemudian menghubungkannya dengan teori dan konsep yang relevan dari tinjauan pustaka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan di Bandar Alai Kari.

5. Interpretasi Data: Setelah data dianalisis, peneliti akan menginterpretasikan temuan-temuan tersebut dalam konteks kebijakan pemerintah dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																							
		Okt 2025				Nov 2025				Des 2025				Jan 2026				Feb 2026				Mar 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Pengeluaran Surat Keputusan																								
3	Persiapan Penyusunan Proposal																								
4	Bimbingan Proposal																								
5	Seminar Proposal																								
6	Revisi Proposal																								
7	Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Peneliti 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM DESA BANDAR ALAI KARI

4.1.1 Sejarah Desa Bandar Alai Kari

Pada masa dahulu Desa Bandar Alai Kari mulanya hanya berupa hutan belukar atau rimba. Kemudian hari ke hari berangsur-ransur datanglah masyarakat dari tepian Batang Kuantan seperti Desa Koto Kari dan Desa Pintu Gobang Kari mulai membuka lahan perkebunan dan ladang. Setelah hutan ditebang mereka lalu berladang kemudian ditanami karet, tetapi mereka tidak bermukim ditempat tersebut hanya menginap beberapa hari, kemudian pulang dan datang lagi menjenguk ladang mereka.

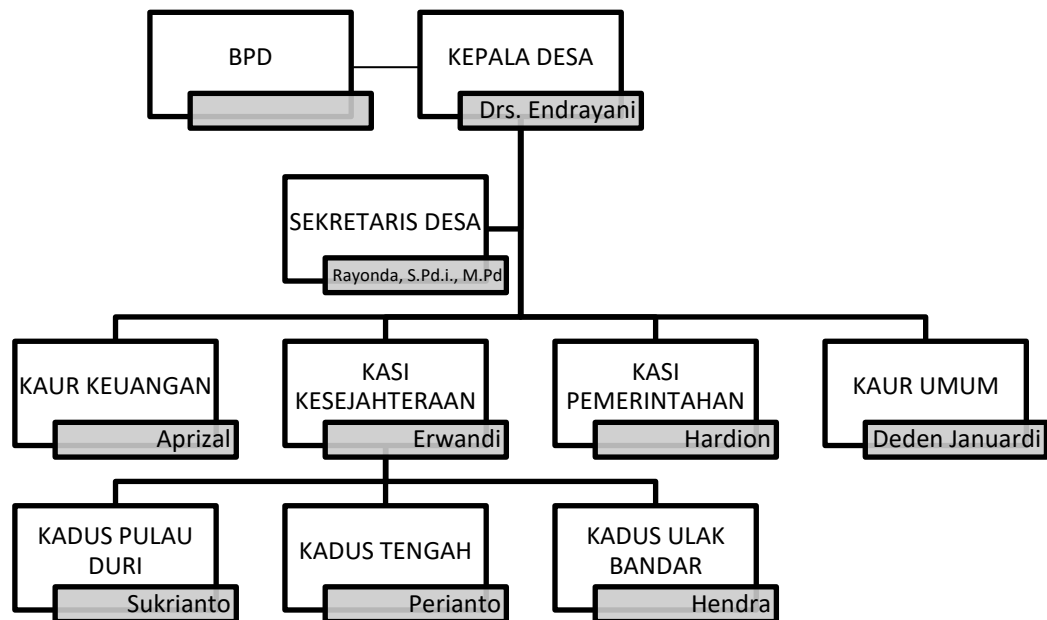
Dikarenakan letak rentang wilayah desa areanya berada diperbukitan maka setiap masyarakat yang pergi menjenguk kebun dan ladang mereka mengatan ke keluarganya akan pergi ke kasang atau ke bukit. Kasang artinya adalah kebun dan ke bukit karena tempatnya tinggi. Kala mereka pulang selalu memandang dari puncak bukit tampatlah dengan jelas dan sangat terang hamparan sawah dan liukan aliran sungai Batang Kuantan.

Setelah terjadinya banjir besar yang melanda maka bertambah banyaklah masyarakat yang datang dan tinggal di sana. Dan seiring waktu berjalan sepatatlah masyarakat membentuk sebuah banjar yang saat itu desa masih di bawah kenegerian yang pucuk pimpinan berada di Kecamatan Kuantan Tengah.

Karena letak desa dilintasi oleh jalan raya antar provinsi Sumatera Barat Riau semakin banyaklah penduduk yang berdatangan. Kemudian atas kesepakatan musyawarah para warga masyarakat dibanjar waktu itu datanglah kepucuk pimpinan kecamatan untuk menjadikan Banjar jadi sebuah Desa. Karena nama desa belum ada maka diambil kata Bandar dan Alai yang menjadi nama Desa Bandar Alai Kari, karena dilalui oleh sebuah sungai serta ditumbuhi oleh pohon alai.

Adapun pejabat Kepala Desa Bandar Alai Kari mulai dari Tahun berdiri sampai sekarang sebagai berikut:

1. Tahun 1978-1989 Abidin Engku Lunak sebagai Kepala Desa
2. Tahun 1990-1998 Nurhasan sebagai Kepala Desa
3. Tahun 1999-2012 Maryunus Kepala Desa
4. Tahun 2013-2014 Guskardi, S.Ag sebagai Kepala Desa
5. Tahun 2015-2016 Syafrial, S.E sebagai Pj Kepala Desa
6. Tahun 2016-2018 Drs Endrayani sebagai Kepala Desa
7. Tahun 2019 Syafrizul, SE sebagai Pj Kelapa Desa
8. Tahun 2019-2024 Drs Endrayani sebagai Kepala Desa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari

Sumber : RPJM Desa Bandar Alai Kari 2020-2024

Tabel 4.1 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Bandar Alai Kari

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
1.	Kepala Desa	Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.	Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Dll
2	Sekretaris Desa	Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.	Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
3.	Kaur Keuangan	Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris.	Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa.

NO	JABATAN	TUGAS	FUNGSI
4.	Kaur Umum	Mengagendakan penerimaan dan pengiriman surat, baik surat keluar ataupun surat masuk kedalam buku agenda desa.	Melaksanakan urusan ketatausaha-an seperti tata naska, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
5.	Kasi Kesejahteraan	Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.	Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
6.	Kasi Pemerintahan	Kepala seksi pemerintahan bertugas untuk membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintah.	Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa.
7.	Kadus I,II,III	Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
8.	BPD	Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.	Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

4.1.2 Demografi Desa Bandar Alai Kari

Tabel 4.2 Letak geografis Desa Bandar Alai Kari

NO	Batas Wilayah	
1	Sebelah Utara	Sungai Kuantan
2	Sebelah Selatan	Desa Kresek Dan Pulau Kedundung
3	Sebelah Barat	Desa Kresek
4	Sebelah Timur	Desa Pulau Banjar Kari

Tabel 4.3 Kondisi Demografis Desa

Desa Bandar Alai Kari mempunyai luas wilayah seluas 8 Km².

NO	Wilayah	Luas
1	Pemukiman	155 hektar
2	Pertanian/Perkebunan	250 hektar
3	Ladang/Tegalan	10 hektar
4	Perkantoran	2 hektar
5	Sekolah	5 hektar
6	Jalan	3,5 KM
7	Lapangan sepak bola	500 meter

Tabel 4.4 Orbitasi

NO	Lokasi	Jarak
1	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	6 KM
2	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	±30 Menit
3	Jarak ke ibu kota kabupaten	6 KM
4	Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten	±30 Menit

Tabel 4.5 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	613 Orang
2	Perempuan	687 Orang
Jumlah		1300 Orang

Tabel 4.6 Keadaan Sosial

NO	Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	45 Orang
2	SD/MI	175 Orang
3	SLTP/MTs	143 Orang
4	SLTA/MA	85 Orang
5	S1/ Diploma	37 Orang
6	Putus Sekolah	8 Orang
7	Buta Huruf	3 Orang

4.1.3 Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Bandar Alai Kari secara umum menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang cukup nyata antar rumah tangga. Kondisi tersebut dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi ke dalam kategori sangat miskin, miskin, sedang, hingga rumah tangga yang tergolong mampu atau kaya. Perbedaan ini tercermin secara kasat mata melalui kondisi tempat tinggal, kepemilikan aset produktif, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Struktur mata pencaharian masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi variasi kondisi ekonomi tersebut. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup pada sektor nonformal, seperti petani, pedagang kecil, dan buruh tani, yang pada umumnya memiliki tingkat pendapatan tidak tetap dan sangat bergantung pada kondisi alam, musim, serta fluktuasi harga pasar. Ketidakpastian pendapatan ini menyebabkan sebagian rumah tangga berada pada posisi rentan terhadap kemiskinan, terutama ketika terjadi gagal panen, penurunan hasil produksi, atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, masyarakat yang bekerja di sektor formal, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah, tenaga honorer, guru, dan tenaga medis, cenderung memiliki pendapatan yang lebih stabil dan terjamin. Kepastian penghasilan bulanan serta akses terhadap berbagai fasilitas dan jaminan sosial memberikan peluang yang lebih besar bagi kelompok ini untuk meningkatkan taraf hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menjadikan

mereka relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat yang bekerja di sektor nonformal.

Perbedaan struktur pekerjaan ini pada akhirnya membentuk stratifikasi sosial ekonomi di Desa Bandar Alai Kari. Rumah tangga yang memiliki akses pada pekerjaan formal umumnya berada pada kategori ekonomi sedang hingga tinggi, sementara rumah tangga yang bergantung pada sektor nonformal lebih banyak berada pada kategori miskin dan sangat miskin. Fenomena ini menunjukkan bahwa karakteristik lapangan kerja dan stabilitas pendapatan merupakan nilai penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa

Tabel 4.7 Lembaga pemerintahan

NO	Aparat Desa	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Perangkat Desa	10 Orang
4	BPD	5 Orang

Tabel 4.8 Lembaga kemasyarakatan

NO	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LPM	1 Lembaga
2	PKK	1 Lembaga
3	Posyandu	2 Posyandu
4	Pengajian	4 Kelompok
5	Arisan	4 Kelompok
6	Simpan Pinjam	8 Kelompok

NO	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
7	Kelompok Tani	5 Kelompok
8	Gapoktan	1 Kelompok
9	Karang Taruna	1 Kelompok

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., and Patta Rapanna. 2023. *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Circle of Poverty from a Public Service Perspective*. Syakir Media Press.
- Amdan, L., and M. R. I. Sanjani. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3(1):108–19.
- Andina, W., and A. Wahyudi. 2024. "Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9(1):69–80.
- Annisa, S. 2023. "Peran Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Buruan Sehat, Alami, Ekonomis (Studi Di RW 02 Desa Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung)." UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Anon. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*.
- Arifin, Z. 2021. "Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Di Bandar Alai Kari."
- Dewi, E. Y., S. Susanty, and U. Martayadi. 2024. "Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Kawasan Ekowisata Mangrove Di Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Responsible Tourism* 4(1):47–56.
- Fitriani, N. N. 2022. "Pengaruh Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 2021 Terhadap Pendapatan Nelayan (Studi Di Kelurahan Mayangan Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo)." Universitas Panca Marga.
- Hildawati, H., D. Erlianti, D. Afrizal, A. Hendrayady, A. Riwayati, W. Widyawati, A. Iskandar, L. Judijanto, M. Mutmainnah, E. M. Hijeriah, and M. F. M. Putra. 2024. *Sistem Administrasi Negara: Teori Dan Praktik*. PT Green Pustaka Indonesia.
- Indonesia, Pemerintah Republik. 2014. *Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

- Indrawati, I., E. Ermawati, and R. Istiqamah. 2019. "Pengaruh Pendidikan Dan Pekerjaan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderating Di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong." *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(2):38–69.
- Iswahyudi, I., and N. Asnawi. 2024. "Menuju Kebijakan Sosial Berorientasi Kapabilitas: Telaah Pemikiran Amartya Sen Dan Martha Nussbaum." *Multikultura* 3(4):4.
- Kurniawati, I. D. 2022. "Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020: Pendekatan Ekonometrika Spasial."
- Luaylik, N. F. 2020. "Dari Negara Menjadi Publik Sentris: Kajian Historis Pelaksanaan Administrasi Indonesia Tahun 1900-An." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 1(1):63–73.
- Muslimah, U. 2021. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan)." Universitas Islam Riau.
- Mustakim, A. 2022. "Strategi Penanganan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau." Universitas Islam Riau.
- Noor, Juliansyah. 2016. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Prenada Media.
- Pinontoan, M. 2020. *Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Kajian Teoretis, Pragmatis Dan Holistik*. Penerbit NEM.
- Ridwan, R. 2021. "Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 28(1):1–20.
- Sahlania, O., and R. Mana. 2023. "Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Laika Di Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari." *Jurnal Ilmiah Administrasita* 14(1):22–29.
- Shakroni, U. 2023. "Dinamika Dan Konflik Dalam Proses Relokasi Pedagang Pasar Baru Kecamatan Kanigaran Probolinggo." Universitas Panca Marga.
- Sianipar, S. P., V. A. Masinambow, and A. L. C. P. Lopian. 2022. "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota

- Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 22(1).
- Statistik, Badan Pusat. 2025. “Data Dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kuantan Singingi.”
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sukmana, O. 2022. “Literasi Dan Peran Aktor Pemberdaya Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Komunitas Di Kampung Wolulas, Malang.” *Sosio Konsepsia* 291–305.
- Syafari, M. R. 2021. *Administrasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Syafii, S. 2020. “Urgensitas Sanad Sebagai Modal Sosial Pesantren Dalam Deradikalisasi Islam.” *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization* 3(1):161–90.
- Thamrin, M. A., and D. Wahyudi. 2021. “Pemberdayaan Lingkungan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Koto Mesjid Yang Unggul Dan Asri.” in *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Vol. 1.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Media Pressindo.
- Yunita, L. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Jalan Semenisasi Di Desa Muaro Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.” *JUHANPERAK* 2(3):226–39.
- Zein, M. H. M., and S. Septiani. 2023. *Ilmu Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.

Survei lapangan
pels. i
Sindi Sindi.

DAFTAR WAWANCARA

A. Identitas Peneliti

Nama : May Shindy Febiola
NPM : 220411041
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Wawancara ini tidak mengandung unsur politik.
2. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
3. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
4. Identitas Bapak/Ibu/Saudara/i dijamin kerahasiannya.
5. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur Pemerintahan Dan Masyarakat Miskin Desa Bandar Alai Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

I. Peningkatan Pendapatan.

1. Bagaimana pengaruh program yang diberikan pemerintah daerah terhadap perubahan pendapatan masyarakat miskin di Desa Bandar Alai Kari?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

2. Apakah kebijakan pemerintah daerah saat ini sudah mampu mendorong sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin di Desa Bandar Alai Kari?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

II. Akses Pendidikan

1. Sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan (seperti bantuan sekolah, beasiswa, atau sarana pendidikan) mempermudah akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Desa Bandar Alai Kari?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

2. Apa masih ada kendala yang dihadapi masyarakat miskin dalam mengakses layanan pendidikan meskipun telah ada kebijakan dari pemerintah daerah?

Berikan Ulasan



.....
.....
.....

III. Akses Kesehatan

1. Bagaimana kemudahan masyarakat miskin di Desa Bandar Alai Kari dalam memperoleh pelayanan kesehatan setelah adanya kebijakan dari pemerintah daerah, seperti jaminan kesehatan atau fasilitas layanan kesehatan?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

2. Apakah pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi biaya, jarak, maupun kualitas layanan?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

IV. Kesempatan Kerja

1. Bagaimana peran kebijakan pemerintah daerah dalam membuka kesempatan kerja atau usaha bagi masyarakat miskin di Desa Bandar Alai Kari?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

2. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apakah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) dari pemerintah daerah telah membantu meningkatkan kemampuan dan peluang kerja masyarakat miskin di Desa Bandar Alai Kari?

Berikan Ulasan

.....
.....
.....

Bandar Alai, ... Februari 2026

(.....)

LAMPIRAN

DOKUMENTASI PENELITIAN TENTANG ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DESA BANDAR ALAI KARI



**Gambar 1 : Wawancara Dengan Kepala Bidang
Kemiskinan Dinas Sosial Bapak Irhandi**



Gambar 2 : Wawancara Dengan Kepala Desa dan

Kasi Kesejahteraan Desa Bandar Alai Kari Bapak Endrayani dan Bapak Erwandi



Gambar 3 : Wawancara Dengan Kepala Dusun dan Sekretaris Desa Bandar Alai Kari Bapak Sukrianto dan Bapak Rayondra



Gambar 4 : Wawancara Dengan Masyarakat Miskin 1 Desa Bandar Alai Kari Ibu Asmidawati



Gambar 5 : Wawancara Dengan Masyarakat Miskin 2 Desa Bandar Alai Kari Ibu Risma Irwanti



Gambar 6 : Wawancara Dengan Masyarakat Miskin 3 Desa Bandar Alai Kari Bapak Aprides



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Getot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail: uniksuingi@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 09/Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

Memperhatikan : Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN : 1030058402
- b. Pembimbing II : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN : 1002059002

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : May Shindi Febiola
NPM : 220411041

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingdalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Pintu Gobang Kart).

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.



- Tembusan :**
1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
 2. Mahasiswa
 3. Arsip



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

Teluk Kuantan, 22 Desember 2025

Nomor : 140/FIS/UNIKS/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : Permohonan Riset

Kepada Yth:

Bapak/Ibu Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dengan ini menerangkan
bahwa:

Nama : May Shindy Febiola
NPM : 220411041
Fakultas : Ilmu Sosial
Program Studi : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

Saat ini mahasiswa yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan penelitian dalam
rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) sebagai berikut :

Judul Penelitian : Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan
Singingi Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus
Desa Bandar Alai Kari)
Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kab. Kuantan Singingi dan Kantor Desa
Bandar Alai Kari

Untuk keperluan riset tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan
kiranya memberi izin penelitian, wawancara dan data yang diperlukan mahasiswa yang
bersangkutan.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu
kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmtsp@kuansing.go.id, Website : <https://dpmtsp.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 13/DPMTSP-PTSP/1.04.02/2026

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:140/FIS/UNIKS/XII/2025 Tanggal 22 DESEMBER 2025.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : MAY SHINDY FEBIOLA
NIM : 220411041
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : TELUK KUANTAN
Judul Penelitian : "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS DESA BANDAR ALAI KARI)"
Untuk melakukan Penelitian di : 1. DINAS SOSIAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 2. KANTOR DESA BANDAR ALAI KARI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 13 Januari 2026

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kuantan Singingi,

ERDIANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19720821 199201 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Website: <https://disospmendes.kuantansing.go.id>
E-mail: kuansingdinsospmd@gmail.com
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DinsosPMD-Skr/11/118

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAY SHINDY FEBIOLA
Nim : 220411041
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kantor Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi terhitung pada
tanggal, 23 Februari 2026. Adapun selama melaksanakan Penelitian, telah
menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 23 Februari 2026

a.n. Plt. Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kuantan Singingi
Kasubbag Umum



Enas Mawati, SE
Piajak. I /II/c
NIP.19700406 200701 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KANTOR KEPALA DESA BANDAR ALAI
Alamat : Jalan Utama Desa Bandar Alai

Bandar Alai, 04 Maret 2026

Nomor : 34/BA/III/2026
Lampiran :-

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ilmu
Sosial Universitas Islam Kuantan
Singingi

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ENDRAYANI
Jabatan : Kepala Desa Bandar Alai

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MAY SHINDY FEBIOLA
NIM : 220411041
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Desa Bandar Alai dengan judul penelitian : "Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : BANDAR ALAI
PADA TANGGAL : 04 MARET 2026
KEPALA DESA BANDAR ALAI

Drs. ENDRAYANI



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-581655,
e-mail.unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA : MAY SHINDY FEBIOLA
NPM : 220411041
DOSEN PEMBIMBING : Dosen Pembimbing I : Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
Dosen Pembimbing II : Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
JUDUL : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Pintu
Gobang Kari)

Mulai Bimbingan :

No	Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing		Paraf Mahasiswa
			1*	2**	
1	23 Oktober 2025	Perbaiki prosedur Penulisan			
2	3 November 2025	Perbaiki Spasi Perbaiki daftar isi Perbaiki kerangka pemikiran			
3	3 November 2025	Tambahkan lokasi dan waktu penelitian			
4	3 November 2025	Tambahkan jadwal penelitian			
5	5 November 2025	Tambahkan abstrak dan kata pengantar			
6	5 November 2025	tambahkan daftar tabel			

7	5 November 2025	tambahkan data masyarakat miskin		2.	
8	5 November 2025	tambahkan hipotesis definisi operasional konsep variabel		2.	
9	5 November 2025	Amby Atcar dari kemiskinan		2.	
10	11 November 2025	Perbaiki Spasi abstrak perbaiki penulisan isi Perbaiki margin		2.	
11	11 November 2025	Masukkan Indikator di definisi operasional		2.	
12	11 November 2025	tambahkan Sumber data		2.	
13		fee		2.	
14	17/11-25	Apa saja program pem. Keterbelakangan.	1/2.		
15		Tambahkan Teori -> persepsi sosial.	1/2		
16					
17	19/11-25	fee & seminar	1/2		
18	12/01-2026	Buat tabel pada Bab 4		2.	
19	15/01-2026	Buat daftar wawancara		2.	

20	13/4-2026	Lengkapi Skripsi nya			
21	27/04-26	Pembahasan & Analisis	RP		
22	29/04-26	Pembahasan & Analisis lebih di kembangkan	RP.		
23		Gesam ditambahkan.			
24	8/5-26	Acc & Ujian.	RP		
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					

33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					

Teluk Kuantan,2025

Pembimbing I



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Pembimbing II



Emilia Emharis, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gotot Subroto KM. 07Kebun Nenas jake Telp.0760-561655, e-mail unisksuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : May Shindy Febiola

NPM : 220411041

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam
Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Desa Bandar Alai Kari)

Hari/Tgl Ujian : Senin / 01 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Desriadi, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.





YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

Form 11

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : **May Shindy Febiola**

NPM : 220411041

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Bandar Alai Kari).

Hari/Tgl Ujian : Kamis / 18 Juni 2026

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Sekretaris / Pembimbing 2	2.
3.	Rika Ramadhanti, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 1	4.
5.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Anggota / Penguji 2	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : May Shindy Febiola
Tempat/Tanggal Lahir : Pintu Gobang Kari/17 Mei 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Pintu Gobang Kari
Alamat Email : mayshindyfebiola210@gmail.com
Pendidikan : 1. Tahun 2016 LULUS SD Negeri 013 Kari
2. Tahun 2019 LULUS SMP Negeri 3 Kari
3. Tahun 2022 LULUS SMAN 1 Teluk Kuantan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 8 Juni 2026

Penulis



May Shindy Febiola
NPM.220411041